

**POLITIK TUBUH POST-FEMINISME:  
KAJIAN GENDER TERHADAP BENTUK-BENTUK KEKERASAN  
SEKSUAL DI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**AMINATUL FAIZAH**

NIM: 22.C1.0046

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang dikonstruksikan oleh patriarki dengan memposisikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol sosial, moral, dan hukum. Dalam konteks tersebut, negara merespons meningkatnya kasus kekerasan seksual melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana UU TPKS mampu mengakui otonomi perempuan atas tubuhnya di tengah ideologi patriarki yang masih memandang tubuh perempuan sebagai memiliki fungsi sosial bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur feminisme, khususnya pemikiran Carol Smart tentang politik tubuh perempuan serta wawancara mendalam dengan Tirtawening, S.H., M.Si. sebagai informan kunci untuk meneguhkan analisis penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam sistem hukum Indonesia tidak diposisikan sebagai entitas yang netral dan sepenuhnya otonom, melainkan sebagai arena pertarungan antara kepentingan moral, agama, dan fungsi sosial. Kemampuan biologis perempuan untuk mengandung dan melahirkan direduksi menjadi fungsi sosial yang melegitimasi kontrol negara dan masyarakat atas tubuh perempuan. UU TPKS memang memberikan perlindungan penting terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual, namun pengakuan tersebut masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, UU TPKS mengakui integritas tubuh perempuan, hak atas perlindungan, pemulihan dan pencegahan kekerasan seksual; namun di sisi lain, hukum ini masih beroperasi dalam kerangka patriarki yang menempatkan tubuh perempuan dalam relasi moral keluarga dan kepentingan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS belum sepenuhnya memulihkan otonomi perempuan atas tubuhnya, melainkan lebih bersifat reaktif terhadap kekerasan seksual tanpa membongkar struktur patriarki yang melatarbelakanginya.

**Kata kunci:** *politik tubuh perempuan, otonomi perempuan atas tubuhnya, patriarki, kekerasan seksual, UU TPKS.*

## ABSTRACT

*Sexual violence against women is a structural problem constructed by patriarchy that positions women's bodies as objects of social, moral, and legal control. In this context, the Indonesian state responded to the increasing incidence of sexual violence through the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). This study aims to examine the extent to which the UU TPKS recognizes women's bodily autonomy within a patriarchal ideology that continues to perceive women's bodies as having a social function for society. This research employs a normative-juridical (juridical-sociological) research method, using both a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations, feminist legal scholarship—particularly Carol Smart's feminist theory on the politics of women's bodies—as well as in-depth interviews with Tirtawening, S.H., M.Si., who served as a key informant to reinforce the author's analysis.*

*The findings indicate that within the Indonesian legal system, women's bodies are not positioned as neutral or fully autonomous entities, but rather as arenas of contestation among moral, religious, and social interests. Women's biological capacity to conceive and give birth is reduced to a social function that legitimizes state and societal control over women's bodies. While the UU TPKS provides important legal protection for women as victims of sexual violence, such recognition remains ambivalent. On the one hand, the UU TPKS acknowledges women's bodily integrity, the right to protection, recovery, and the prevention of sexual violence. On the other hand, the law continues to operate within a patriarchal framework that situates women's bodies within family morality and broader social interests. Accordingly, this study concludes that the UU TPKS has not fully restored women's bodily autonomy. Rather, it functions primarily as a reactive legal instrument addressing acts of sexual violence without dismantling the patriarchal structures that underpin and reproduce such violence.*

**Keywords:** *politics of women's bodies, women's bodily autonomy, patriarchy, sexual violence, UU TPKS.*